



UPAYA DIPLOMASI PERSUASIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH KASHMIR ANTARA INDIA DAN PAKISTAN

Arvi Octabiana¹, Aan Anisah², Muhammad Arvin Zakiy Fuadi³, Syafiqa Nadhira Kusuma⁴,
Deriel Pratama Putra⁵, Bintang Afifah Nailah Surya⁶

Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

[¹arviocaviana23@gmail.com](mailto:arviocaviana23@gmail.com), [²anannisahhhh@gmail.com](mailto:anannisahhhh@gmail.com), [³zakifuadi211@gmail.com](mailto:zakifuadi211@gmail.com),
[⁴syafiqanadh15@gmail.com](mailto:syafiqanadh15@gmail.com), [⁵derielputra25@gmail.com](mailto:derielputra25@gmail.com), [⁶bintangafifah27@gmail.com](mailto:bintangafifah27@gmail.com)

Abstract

The Kashmir conflict between India and Pakistan has been ongoing since 1947, making it one of the most complex territorial disputes in the world. The situation is exacerbated by colonial legacies, differences in national identity and religion, and the strategic interests of these two nuclear-armed nations. Various attempts at resolution, whether through diplomatic pressure, military action, or the involvement of international entities such as the United Nations (UN), have failed to produce a lasting peaceful resolution. An alternative approach known as persuasive diplomacy has emerged, with the UN playing an important role through the UNMOGIP mission responsible for monitoring ceasefire violations. However, the effectiveness of UNMOGIP has been limited by restricted access, mandate constraints, and a lack of cooperation, particularly from India following the 1972 Simla Agreement. The principle of self-determination through a referendum is often suggested as a peaceful resolution; however, its implementation is hindered by conflicting territorial claims and the domestic political landscape in both countries. The lack of mutual trust, the influence of local factions, and the continued exploitation of the Kashmir issue for domestic political gain further complicate the negotiation process. This study emphasizes that the effectiveness of persuasive diplomacy is significantly influenced by domestic political stability, willingness to compromise, and active support from the international community. Therefore, while persuasive diplomacy holds considerable promise for promoting peace, the existing structural and political obstacles mean that this strategy requires strong commitment from all parties involved, reforms within the international framework, and the adoption of a comprehensive approach that takes into account the historical context, collective identity, and aspirations of the Kashmiri people to achieve a fair resolution.

Abstrak

Konflik Kashmir antara India dan Pakistan telah berlangsung sejak tahun 1947, yang merupakan salah satu perselisihan teritorial yang paling rumit di dunia. Situasi ini diperparah oleh warisan colonial, perbedaan identitas nasional dan agama, dan kepentingan strategis dari kedua negara bersenjata nuklir ini. Berbagai upaya penyelesaian, baik melalui tekanan diplomatic, aksi militer, maupun keterlibatan entitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah gagal dalam menghasilkan resolusi damai yang langgeng. Sebuah pendekatan

Kata Kunci:

Diplomasi Persuasif
Konflik Kashmir
India dan Pakistan

alternative yang dikenal sebagai diplomasi persuasif telah muncul dengan PBB memainkan peran penting melalui misi UNMOGIP yang bertanggung jawab untuk memantau pelanggaran gencatan senjata. Akan tetapi, efektivitas UNMOGIP telah dibatasi oleh keterbatasan akses, pembatasan mandate, dan kurangnya kerja sama, terutama dari India setelah Perjanjian Simla 1972. Prinsip penentuan nasib sendiri melalui referendum sering kali disarankan sebagai resolusi damai; akan tetapi, pelaksanaannya terhalang oleh klaim teritorial yang saling bertentangan dan lanskap politik domestik di kedua negara. Kurangnya rasa saling percaya, pengaruh faksi-faksi lokal, dan eksploitasi isu Kashmir yang terus menerus dilakukan untuk kepentingan politik domestik semakin memperumit proses negosiasi. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas diplomasi persuasif secara signifikan dipengaruhi oleh stabilitas politik dalam negeri, kesediaan untuk mencapai kompromi, dan dukungan aktif dari komunitas internasional. Oleh karena itu, meskipun diplomasi persuasif memiliki harapan yang cukup besar untuk mendorong perdamaian, hambatan struktural dan politik yang ada membuat strategi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, reformasi dalam kerangka kerja internasional, dan adopsi pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan konteks historis, identitas kolektif, dan aspirasi masyarakat Kashmir untuk mencapai resolusi yang adil.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Bintang Afifah Nailah Surya
Nama Program Studi : Program Studi Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Tidar
Email: bintangafifah27@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konflik wilayah Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan telah berlangsung sejak tahun 1947, menjadikannya salah satu konflik berkepanjangan dalam sejarah dunia. Kawasan ini menjadi pusat perselisihan karena nilai strategisnya serta perbedaan identitas kebangsaan dan keagamaan antara kedua negara. Perselisihan tersebut tidak hanya mengancam stabilitas di kawasan Asia Selatan, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap keamanan global, mengingat kedua negara merupakan kekuatan bersenjata nuklir. Konflik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan nasional, peran aktor non-negara, serta keterlibatan negara-negara besar. Berbagai pendekatan telah dicoba, seperti penggunaan tekanan diplomatik dan kekuatan militer, namun belum dapat menghasilkan penyelesaian yang langgeng.

Dalam situasi tersebut, pendekatan diplomasi persuasif menjadi opsi alternatif yang patut diperhitungkan. Strategi ini mengedepankan dialog terbuka, kerja sama antar pihak, dan pembangunan kepercayaan sebagai landasan utama penyelesaian. Salah satu upaya internasional dalam hal ini adalah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui misi United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), yang bertugas mengawasi pelanggaran gencatan senjata dan memberikan laporan independen. Akan tetapi, efektivitas UNMOGIP masih menjadi sorotan karena keterbatasan wewenang dan akses, khususnya di wilayah yang dikuasai India. Hal ini sangat diperlukan pembaruan pendekatan atau reformasi dalam tubuh PBB untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjaga perdamaian di kawasan tersebut.

Aspek penting lainnya dalam diplomasi persuasif adalah prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*). Melakukan referendum merupakan resolusi damai yang sesuai dengan keinginan penduduk Kashmir. Para pendukung berpendapat bahwa integrasi Kashmir ke dalam India penuh dengan komplikasi hukum dan berpendapat bahwa mayoritas warga Kashmir lebih memilih kemerdekaan berafiliasi daripada dengan India atau Pakistan.

Namun demikian, pelaksanaan diplomasi persuasif menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakpercayaan antara India dan Pakistan, serta pengaruh kelompok domestik yang memiliki agenda tersendiri. Asese (2024) mencatat bahwa kegagalan perundingan bilateral pada periode 1947–1956, 1962–1963, dan 1999–2007 disebabkan oleh dinamika politik dalam negeri dan absennya kesepakatan di tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan persuasif tidak hanya ditentukan oleh diplomasi antarnegara, melainkan juga oleh kestabilan politik domestik masing-masing pihak.

Melihat kompleksitas konflik ini dan beragam pendekatan yang telah dicoba, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi dan tantangan dari strategi diplomasi persuasif dalam penyelesaian konflik wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Penekanan utama akan diberikan pada penerapan strategi persuasi, kontribusi aktor internasional, serta dinamika politik internal yang memengaruhi proses negosiasi damai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan yang menjadi dasar kajian ini. Pertama, mengapa konflik wilayah Kashmir antara India dan Pakistan masih berlangsung hingga saat ini meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan? Kedua, sejauh mana pendekatan diplomasi persuasif dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dibandingkan pendekatan koersif dan militer yang selama ini dominan? Ketiga, bagaimana peran aktor internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta dinamika politik domestik di kedua negara, memengaruhi jalannya proses negosiasi dan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus analisis dalam kajian ini untuk memahami lebih dalam potensi dan tantangan dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metode studi literature merupakan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun berbagai literature dari berbagai sumber, seperti artikel, berita, penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini, literature dikumpulkan dengan mencari kata kunci yang relevan di berbagai database jurnal, buku, dan sumber lain yang dapat dipercaya yang membahas tentang upaya diplomasi persuasive dalam penyelesaian suatu sengketa di antara negara, terutama yang berkaitan dengan sengketa antara India dan Pakistan. Selain itu, literature yang dikumpulkan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan ketetapan waktu dari sumber-sumber tersebut untuk menjamin bahwa data yang digunakan selaras dengan tujuan penelitian secara valid. Proses pemelihan melibatkan pembacaan kritis terhadap konten literature, menyoroti poin-poin penting, dan mengkategorikan sumber-sumber yang paling tepat untuk dianalisis dan dituangkan dalam studi literature penulisan ini.

3. PEMBAHASAN

Konflik Antara India dan Pakistan Masih Terjadi Meskipun Segala Upaya Telah Dilakukan

Konflik wilayah Kashmir antara India dan Pakistan merupakan salah satu sengketa teritorial yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah politik Asia Selatan. Berdasarkan kajian literatur, konflik ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh persoalan kedaulatan wilayah, tetapi juga oleh dimensi historis, identitas nasional, kepentingan politik domestik, serta dinamika keamanan kawasan.

Secara historis, konflik ini bermula dari proses dekolonisasi India pada tahun 1947, ketika wilayah kekuasaan Inggris di anak benua India dibagi menjadi dua negara berdaulat: India dan Pakistan. Dalam konteks ini, negara-negara bagian yang berada di bawah kekuasaan kerajaan (*princely states*) diberikan kewenangan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara. Penguasa Jammu dan Kashmir, Maharaja Hari Singh, yang beragama Hindu, memilih bergabung dengan India, meskipun mayoritas penduduk wilayah tersebut beragama Islam. Keputusan tersebut memicu ketegangan dan konfrontasi militer antara India dan Pakistan yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata pertama pada tahun 1947–1948.

Selain aspek historis, faktor identitas nasional turut menjadi penghalang utama dalam upaya penyelesaian konflik. India memandang wilayah Jammu dan Kashmir sebagai bagian integral dari negara kesatuan, terlebih sejak dihapusnya status otonomi khusus wilayah tersebut melalui pencabutan Pasal 370 Konstitusi India pada tahun 2019 (*Article 370: What Happened with Kashmir and Why It Matters*, 2019). Di sisi lain, Pakistan mengklaim bahwa Kashmir, sebagai wilayah mayoritas Muslim, secara logis dan ideologis seharusnya menjadi bagian dari negaranya. Perbedaan fundamental dalam klaim teritorial ini mempersempit ruang kompromi dalam setiap perundingan bilateral.

Konflik ini juga diperkuat oleh dinamika politik domestik di kedua negara. Isu Kashmir kerap dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperkuat dukungan elektoral melalui retorika nasionalis. Dalam banyak kasus, pernyataan-pernyataan keras terkait Kashmir digunakan untuk membangun narasi politik yang menguatkan posisi pemerintah, terutama menjelang pemilihan umum (Bose, 2003).

Lebih lanjut, rendahnya tingkat kepercayaan antara India dan Pakistan juga menjadi kendala serius dalam membangun kerangka resolusi konflik yang berkelanjutan. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti Perjanjian Simla (1972) dan Deklarasi Lahore (1999), proses perdamaian sering kali terganggu oleh insiden kekerasan, termasuk serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok militan yang berbasis di Pakistan, seperti Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba. India menuduh Pakistan memberikan dukungan tidak langsung kepada kelompok-kelompok tersebut, meskipun tuduhan ini berulang kali dibantah oleh pemerintah Pakistan.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik Kashmir merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensional. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengedepankan dialog politik, tetapi juga mengakomodasi aspek historis, identitas kolektif, serta mekanisme peningkatan kepercayaan antara kedua negara. Tanpa adanya komitmen politik

yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil serta organisasi internasional, konflik ini berpotensi terus berlarut dalam waktu yang tidak terbatas.

Sejauh Mana Pendekatan Diplomasi Persuasif Dapat Menjadi Solusi Alternatif Yang Efektif Dibandingkan Pendekatan Koersif dan Militer Yang Selama Ini Dominan

Dalam praktik hubungan internasional, diplomasi berfungsi sebagai alat utama bagi negara-negara untuk meraih sasaran politik serta keamanan tanpa terjebak dalam pertempuran bersenjata. Dua metode diplomasi yang sering digunakan adalah diplomasi persuasif dan diplomasi koersif. Metode diplomasi persuasif berfokus pada negosiasi dan memiliki sifat yang lebih preventif atau berupaya mencegah konflik yang lebih serius hingga terjadinya perang. Disisi lain diplomasi koersif ialah diplomasi yang menggunakan tekanan, ancaman, atau kekuatan militer untuk memaksa pihak lain memenuhi tuntutan tertentu. Metode ini cenderung menggunakan kekuatan keras, seperti sanksi ekonomi, pengiriman pasukan, atau demonstrasi kekuatan militer yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik terbuka.

Masing-masing dari metode ini memiliki keuntungan dan kelemahan yang bervariasi, tergantung pada situasi serta tujuan yang ingin dicapai. Namun, keberhasilan diplomasi koersif dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada beberapa faktor, seperti kejelasan dalam tuntutan, tingkat kredibilitas ancaman yang diungkapkan, serta adanya tenggat waktu yang jelas. Diplomasi koersif sering kali menghadapi hambatan yang sangat signifikan saat diterapkan, terutama jika negara yang menjadi target memiliki alasan yang kuat untuk menolak permintaan atau jika ancaman yang diberikan tidak dianggap meyakinkan oleh pihak yang bersebrangan. Di samping itu, diplomasi koersif berisiko merusak hubungan diplomatik yang telah terjalin lama, memicu resistensi, dan bahkan dapat memperburuk konflik hingga mencapai tahap perang terbuka. Dengan demikian, diplomasi koersif bukanlah solusi yang selalu berhasil, terutama jika tidak didukung oleh rencana komunikasi yang jelas dan pemahaman yang menyeluruh tentang motivasi serta kepentingan pihak lawan.

Dengan memahami konsep terkait dengan diplomasi persuasif dan koersif, kita dapat mengevaluasi seberapa baik kedua metode pendekatan ini dapat diterapkan dalam konflik nyata, seperti yang terjadi di wilayah kashmir antara India dan Pakistan. Dalam konteks sengketa di Kashmir, pendekatan koersif yang selama ini menjadi metode pendekatan yang dominan, seperti pengiriman pasukan militer dan tekanan sepihak atau uniteral dari India serta balasan militer dari Pakistan, malah memperpanjang ketegangan dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pendekatan koersif ini sering kali tidak berhasil menghasilkan solusi yang tahan lama karena memicu perlawanan yang kuat dan hilangnya kepercayaan antara kedua belah pihak. Sebagai contoh nya, tindakan India untuk menghapus otonomi Kashmir dengan mencabut Artikel 370 pada tahun 2019 menyebabkan ketegangan yang semakin dalam dan penolakan dari masyarakat Kashmir itu sendiri serta Pakistan, yang menganggap langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa penggunaan tekanan militer dan koersif tanpa adanya dialog yang konstruktif hanya akan memperburuk konflik dan menutup peluang untuk perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam konteks hubungan antarnegara, diplomasi melalui metode persuasif muncul sebagai pilihan penting yang sebaiknya dipertimbangkan dibandingkan dengan metode koersif dan militer yang selama ini mendominasi. Tingkat keberhasilan diplomasi persuasif terletak pada kemampuannya untuk mendorong persetujuan dari pihak lain secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan lebih cenderung berkelanjutan dan stabil, karena berdasarkan pemahaman dan kepercayaan yang dibangun bersama.

Selain itu, metode ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik yang disebabkan oleh tindakan koersif atau militer. Dalam konteks ini, diplomasi persuasif sangat penting untuk menghindari konflik, mempromosikan perdamaian, serta memperkuat posisi suatu negara di arena internasional melalui pengakuan dan reputasi yang dicapai dengan cara damai. Namun, terdapat juga batasan pada efektivitas diplomasi persuasif, terutama ketika dihadapkan pada situasi ancaman nyata atau bila pihak lain tidak merespons upaya bujukan dengan cara yang positif. Di samping itu, diplomasi persuasif memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar, serta sangat tergantung pada pengaruh soft power dan citra negara di kancah global.

Secara keseluruhan, diplomasi persuasif memiliki potensi untuk menjadi solusi alternatif yang lebih baik. Terutama dalam mewujudkan hubungan internasional yang stabil, damai, dan saling menguntungkan. Namun, keberhasilannya dipengaruhi oleh konteks, kekuatan soft power, serta kesediaan pihak lawan untuk melakukan kompromi. Oleh karena itu, sebaiknya diplomasi persuasif dijadikan pendekatan utama dalam situasi damai serta upaya pencegahan konflik, sementara metode koersif dan militer bisa dipertimbangkan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya persuasif tidak menunjukkan hasil yang diinginkan.

Peran Aktor Internasional Seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa Serta Dinamika Politik Domestik Di Kedua Negara Dapat Mempengaruhi Jalannya Proses Negosiasi dan Pencapaian Perdamaian Yang Berkelanjutan

Konflik wilayah Kashmir antara India dan Pakistan merupakan salah satu perselisihan paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Selain karena sengketa wilayah dan sejarah kolonial yang panjang, persoalan ini juga diperumit oleh keterlibatan berbagai aktor internasional serta dinamika politik domestik yang bergejolak di kedua negara. Diplomasi persuasif kemudian hadir sebagai pendekatan alternatif yang bertujuan membangun dialog terbuka, kolaborasi, dan kepercayaan antara pihak yang bersengketa. Meski demikian, strategi ini sering kali dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal yang saling terkait, sehingga sulit diimplementasikan secara efektif.

Keterlibatan aktor internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian konflik wilayah Kashmir. Sejak awal perselisihan pada 1947, PBB berusaha menengahi dengan mengeluarkan Resolusi No. 47 tahun 1948 yang merekomendasikan pelaksanaan referendum sebagai sarana untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Kashmir. Upaya ini diperkuat dengan dibentuknya *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP) yang ditugaskan untuk mengawasi gencatan senjata antara kedua negara. Namun, sejak India menolak melanjutkan kerja sama dengan UNMOGIP setelah penandatanganan Perjanjian Simla tahun 1972, efektivitas misi ini menurun drastis. Kelemahan ini mengurangi kemampuan PBB untuk memberikan tekanan dan pengawasan yang objektif terhadap eskalasi konflik di lapangan, sehingga turut menghambat proses negosiasi yang adil dan terbuka.

PBB berusaha berperan sebagai mediator dan pengawas netral dalam konflik ini dengan menggunakan berbagai mekanisme seperti resolusi dan pengiriman pengamat militer, guna menciptakan situasi yang mendukung dialog. Namun, posisi netralitas tersebut sering terganggu ketika pihak-pihak, terutama India, menolak campur tangan asing dan mengambil kebijakan sepihak terkait status wilayah Kashmir. Akibatnya, PBB lebih berperan sebagai pengamat daripada mediator yang aktif, sehingga kemampuannya dalam mendorong kesepakatan dan kompromi menjadi terbatas. Selain itu, keterbatasan mandat dan kapasitas PBB juga membatasi peran efektifnya dalam memfasilitasi dialog.

Di samping PBB, organisasi regional seperti SAARC juga berusaha menjadi platform untuk meredakan ketegangan antara India dan Pakistan. Meski secara normatif memiliki tujuan mempererat kerja sama regional, SAARC belum mampu menjadi penengah efektif karena adanya batasan struktural, seperti prinsip non-intervensi dan dominasi konflik bilateral dalam agenda pertemuan. Akibatnya, isu Kashmir kerap kali dihindari dalam forum resmi atau hanya dibahas secara umum tanpa solusi konkret. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengaruh lembaga regional dalam mendorong resolusi damai, terutama bila negara-negara anggotanya tidak memiliki komitmen kuat terhadap stabilitas kawasan.

Selain peran internasional, dinamika politik dalam negeri India dan Pakistan juga sangat memengaruhi proses diplomasi persuasif. Di India, pemerintahan yang berorientasi pada nasionalisme Hindu menerapkan kebijakan yang mencabut status otonomi Kashmir, yang sebelumnya memberikan keleluasaan pengelolaan wilayah tersebut. Langkah ini menimbulkan ketegangan dan mempersempit ruang untuk dialog damai karena India menolak campur tangan eksternal dan lebih mengedepankan integrasi penuh secara sepihak. Sementara itu, Pakistan yang secara resmi mendukung penyelesaian damai menghadapi kendala internal, seperti pengaruh militer yang kuat dalam kebijakan luar negeri dan dukungan terhadap kelompok separatis, sehingga mengurangi konsistensi posisi Pakistan dalam mendorong perdamaian. Tekanan politik domestik yang kuat pada kedua negara membuat rasa saling percaya sulit terbentuk, padahal hal itu merupakan dasar penting dalam diplomasi persuasif.

Di sisi lain, Pakistan yang secara resmi mendukung penyelesaian damai melalui referendum justru menghadapi masalah dari dinamika politik domestiknya sendiri. Keterlibatan militer yang dominan dalam kebijakan luar negeri serta dukungan terhadap kelompok separatis membuat posisi Pakistan menjadi tidak konsisten dalam mendukung solusi damai. Di kancah internasional, Pakistan dianggap memiliki sikap ambivalen antara seruan diplomatik dan tindakan yang malah memperburuk ketegangan. Ditambah tekanan dari kelompok konservatif dan ketidakstabilan politik dalam negeri, kebijakan luar negeri Pakistan terhadap India kurang berkesinambungan. Keadaan ini menurunkan tingkat kepercayaan antara kedua negara, sehingga menghambat diplomasi persuasif yang membutuhkan rasa saling percaya dan kompromi.

Oleh karena itu, keterbatasan peran aktor internasional seperti PBB dan kompleksitas politik domestik di India dan Pakistan membuat diplomasi persuasif sulit diterapkan secara efektif dalam konflik Kashmir. Upaya diplomasi akan terus mengalami kebuntuan selama kedua negara masih menggunakan isu Kashmir sebagai alat politik domestik, bukan sebagai agenda penyelesaian jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, PBB perlu memperkuat kapasitas mediasi dan mengajak negara-negara netral untuk membuka ruang dialog yang lebih adil. Sementara itu, India dan Pakistan harus melakukan reformasi internal agar lebih terbuka terhadap diplomasi inklusif yang mengarah pada perdamaian berkelanjutan. Tanpa perubahan signifikan di

tingkat internasional dan nasional, diplomasi persuasif akan tetap menjadi konsep ideal yang sulit diwujudkan dalam realitas politik di Asia Selatan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik Kashmir antara India dan Pakistan merupakan sengketa yang sangat kompleks dan multidimensional yang berakar pada sejarah dekolonisasi tahun 1947. Konflik ini tidak hanya melibatkan persoalan kedaulatan wilayah, tetapi juga dimensi identitas nasional, kepentingan politik domestik, dan dinamika keamanan kawasan. Kompleksitas ini diperparah oleh perbedaan fundamental dalam klaim teritorial, di mana India memandang Kashmir sebagai bagian integral negaranya sementara Pakistan menganggapnya sebagai wilayah yang secara logis dan ideologis seharusnya menjadi bagiannya karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

Keterlibatan aktor internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam upaya penyelesaian konflik Kashmir menunjukkan hasil yang terbatas meskipun telah mengeluarkan berbagai resolusi dan membentuk UNMOGIP. Efektivitas peran PBB menurun drastis terutama setelah India menolak kerja sama dengan UNMOGIP pasca Perjanjian Simla 1972. Sementara itu, dinamika politik domestik kedua negara justru memperburuk situasi, dengan India yang menerapkan kebijakan nasionalis Hindu dan mencabut status otonomi Kashmir, serta Pakistan yang menghadapi inkonsistensi akibat dominasi militer dalam kebijakan luar negeri. Kedua negara juga kerap memanfaatkan isu Kashmir sebagai alat politik domestik untuk memperkuat dukungan elektoral melalui retorika nasionalis.

Dalam konteks penyelesaian konflik, diplomasi persuasif menawarkan alternatif yang lebih baik dibandingkan pendekatan koersif dan militer yang selama ini dominan. Pendekatan koersif, seperti pengiriman pasukan militer dan tekanan sepihak, terbukti memperpanjang ketegangan dan memperburuk kondisi kemanusiaan di Kashmir. Diplomasi persuasif memiliki potensi untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan karena berdasarkan pemahaman dan kepercayaan yang dibangun bersama, serta dapat mengurangi kemungkinan eskalasi konflik. Namun, keberhasilan diplomasi persuasif sangat bergantung pada komitmen politik kedua negara untuk tidak lagi menggunakan isu Kashmir sebagai alat politik domestik, reformasi internal yang membuka ruang untuk diplomasi inklusif, serta dukungan dari komunitas internasional untuk memfasilitasi dialog yang adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Article 370 :What Happened with Kashmir and why it matters.* (2019). BBC News.
- Bose, S. (2003). *Kashmir : Roots of Conflict, Path to Peace*. United States of America.
- Dirham Asese. (2024). Konflik India Pakistan; Mengulik Konflik Agama Dalam Konstelasi Kenegaraan. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2), 190–200.
- Fariz, A., & Muzaki, A. (2024). *GEOPOLITIK PERBATASAN KASHMIR STUDI KASUS : PENGARUH KONFLIK INDIA-PAKISTAN TERHADAP KEAMANAN GLOBAL*. 3(1).
- Febriandi, F. (2018). Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i1.40>
- Khaeruddin Khaeruddin, & Nur Afdalia. (2021). Kashmir; Sengketa Perbatasan India-Pakistan Dan Analisis Hukum Internasional. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 25–36. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i1.1594>
- Khan, A. U. (n.d.). *Abrogation of Article 370 and 35-A : Policy Options for*.
- Khoiriyah, U. M. (2020). Upaya Diplomasi Koersif India Dalam Konflik Sengketa Wilayah Kashmir Tahun 2012-2018. *Dspace.Uii.Ac.Id*, 21(1), 1–9. <https://dspace.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18595/15323036.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Lalwani, S. P., & Gayner, G. (2020). India's Kashmir Conundrum: Before and After the Abrogation of Article 370. *Special Report*, 473, 1–25.
- Mukti, D. A., & Puspitasari, A. (2020). Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019. *Balcony*, 4(2), 105. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/223/103>
- Nisa, A. C. (2020). Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 51–63. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.6>
- Nisar, D. T. (2019). *Kashmir and the abrogation of Article 370 : Can peace be possible , or stalemate continue to hamper India and Pakistan relations in future ? Dr Tehseen Nisar. September.*
- Nugroho, A. Y. (2019). Global Insight Journal. *Global Insight Journal*, 04(01), 45–59.
- Rohmah, D. N., & Wulandari, N. D. (2024). Dampak Konflik Kashmir Dalam Sejarah Sosial Ekonomi India. *Jambura History and Culture Journal*, 6(2), 146–158. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v6i2.23963>
- Sanjiwani, N. P. A. (2022). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 66–85. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.42>
- Sasmita, A. I. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 81. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.21645>